

Media Online	Suara Merdeka
Tanggal	9 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Rembang



Menuju Sistem RDF, Pemkab Rembang Tingkatkan Sarpras Pengelolaan Sampah

Halaman 16

Menuju Sistem RDF, Pemkab Rembang Tingkatkan Sarpras Pengelolaan Sampah

Diawali Beli 6 Truk dan Tempat Sampah Pilah

REMBANG - Menuju pengelolaan sampah dari sistem open dumping ke Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Landoh Kecamatan Sulang, Pemkab Rembang terus mengupayakan peningkatan sarana prasarana (sarpras) pendukung.

Terbaru, pada awal Mei 2025 ini, Pemkab Rembang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengadaan 6 unit truk arm roll untuk mengangkut sampah dari kecamatan menuju TPA Landoh.

Truk tersebut dibeli melalui dana APBD 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 4.128.600.000. Truk tersebut saat ini sudah diserahkan kepada DLH dan beroperasi untuk melengkapi armada lainnya.

Selain truk arm roll, untuk menunjang RDF, pihaknya juga sudah melakukan pengadaan puluhan tempat sampah pilah senilai Rp 200 juta. Tempat sampah tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Rembang.

Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi menyatakan, dengan penambahan 6 armada baru, saat ini pihaknya memiliki total 15 unit truk pengangkut sampah. Truk-truk tersebut selama ini sudah operasional secara rutin pengambilan sampah dengan menyasar fasilitas umum.

Di luar fasilitas umum itu, DLH Rembang juga tengah melayani penanganan sampah langsung ke desa. Lantaran masih ada keterbatasan di sarana prasarana, sementara ini dari 294 desa di Kabupaten Rembang, baru 115 desa yang terlayani langsung penanganan sampah truk DLH.

Ika mengungkapkan, sejumlah fasilitas yang sudah dipenuhi untuk menuju sistem pengelolaan sampah RDF di Landoh antara lain adalah akses menuju



PENGELOLAAN SAMPAH: Salah satu potret pengelolaan sampah di TPA Landoh Kecamatan Sulang.

lokasi. Selain itu, untuk penunjang listrik dan air, saat ini sedang berproses melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) serta PDAM.

"Penambahan daya listrik untuk menunjang sistem RDF serta debit air PDAM sudah diprogres pada tahun ini. Anggaran kurang lebih mencapai Rp 700 juta. Ada lagi aspek sosial oleh Kementerian, antara lain jalan dan penanggulangan pencemaran lingkungan," terang Ika, Kamis (8/5).

Ia memaparkan, pembangunan pengelolaan sampah sistem RDF ini akan dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat dengan anggaran Rp 120 miliar. Semula, proyek strategis ini akan dilaksanakan akhir tahun ini.

Namun, karena terkait dengan persetujuan Presiden, maka proyek ini mundur pada awal 2026 mendatang. Nilai anggarannya masih sama, yaitu sebesar Rp 120 miliar. Pemkab

Rembang dalam hal ini adalah sebagai penerima manfaat.

Sementara itu, Bupati Rembang, Harno saat dikonfirmasi memastikan, pengelolaan sampah sistem RDF menjadi salah satu bagian rencana pemerintahannya. Pihaknya mengakui, mendapatkan informasi bahwa proyek ini diundur karena terdampak refocusing anggaran.

Hanya saja, sebagai pimpinan Kabupaten Rembang pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan proyek tersebut. Sambil menunggu pelaksanaan proyek ini, ia sudah meminta pengelolaan sampah harus tetap dilaksanakan secara optimal.

"Kemarin kami sudah ke Jakarta. Kami juga berkirim surat ke Kementerian menanyakan soal itu. Intinya, kami akan menunggu info lanjutan dari pemerintah pusat," tandasnya. (lee)